PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMALSUAN DATA SILSILAH KELUARGA DALAM SENGKETA WARIS TANAH (STUDI KASUS DI DESA BUDUK)

I MADE PIRIA PISADA
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: piriapisada@gmail.com

Abstract

Falsification of family tree data in inheritance disputes is a legal issue that can create legal uncertainty and harm the rights of legitimate heirs. This study aims to analyze the legal regulations related to falsification of inheritance tree data in the national legal system and the legal protection provided for victims in Buduk Village. This research uses empirical legal methods with a qualitative descriptive approach through interviews, observation, documentation, and literature review. The results indicate that regulations regarding falsification of family tree data are scattered across various laws and regulations and have not been specifically regulated, thus creating difficulties in providing evidence. Legal protection for victims is provided through family deliberations, village mediation, and administrative verification, but these have not provided optimal legal certainty. Therefore, strengthening data verification and administrative oversight is necessary to ensure the protection of legitimate heirs' rights.

Keywords*: Falsification of Family Tree Data, Inheritance Disputes Land, Legal Protection.*

Abstrak

Pemalsuan data silsilah keluarga dalam sengketa waris merupakan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak ahli waris yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pemalsuan data silsilah waris dalam sistem hukum nasional serta perlindungan hukum terhadap korban di Desa Buduk. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemalsuan data silsilah keluarga masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara khusus, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian. Perlindungan hukum terhadap korban dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi desa, dan verifikasi administrasi, namun belum memberikan kepastian hukum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan verifikasi data dan pengawasan administrasi untuk menjamin perlindungan hak ahli waris yang sah.

Kata Kunci: Pemalsuan Data Silsilah Keluarga, Sengketa Waris Tanah, Perlindungan Hukum.